

**ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA  
PADA PERAGA KAMPANYE PARTAI POLITIK PEMILU GUBERNUR  
JAWA BARAT DAN BUPATI MAJALENGA PERIODE 2018 - 2023**

Deden Sutrisna

Dosen PBSI Universitas Majalengka  
*deden.sutrisna@gmail.com*

Yusi Nuraeni

Mahasiswa PBSI Universitas Majalengka  
*yussinuraeni20@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penggunaan akronim yang terdapat dalam alat peraga kampanye. Untuk mengetahui kesalahan penggunaan akronim yang terdapat pada alat peraga kampanye tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesalahan penggunaan akronim pada alat peraga kampanye. Kesalahan penggunaan akronim tersebut terdapat pada alat peraga kampanye pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut-3, Pada Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur no urut-4, Pada Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur No Urut-2 dan pada pasangan calon bupati dan wakil bupati no urut-4. Kesalahan tersebut didominasi oleh kesalahan pemilihan kata yang terlalu memaksakan.

**Kata Kunci:** *akronim, kesalahan, dan alat peraga kampanye*

## A. PENDAHULUAN

Bahasa merupakan salah satu budaya manusia yang sangat tinggi nilainya karena dengan bahasa manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dengan bahasa pula manusia dimungkinkan dapat berkembang dan mengabstraksikan berbagai gejala yang muncul di sekitarnya. Jelas bahwa bahasa sangat penting peranannya dalam kehidupan sosial dan boleh dikatakan manusia berbahasa setiap hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan bermimpi pun manusia berbahasa pula. Bahasa tumbuh dan dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang meliputi kegiatan bermasyarakat seperti perdagangan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan sebagainya. Bahasa mampu menransfer keinginan, gagasan, kehendak, dan emosi dari seseorang kepada orang lain (Chaer, 2003:38).

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang tentunya merupakan bahasa sehari-hari sebagai alat komunikasi dalam berbagai bidang. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Dalam bahasa Indonesia dikenal berisi banyak singkatan dan akronim yang digunakan sehari-hari dan tersebar di seluruh Indonesia. Buktinya dapat dilihat pada alat-alat peraga kampanye. Dari singkatan dan akronim tersebut kebanyakan orang sudah mengetahuinya karena sudah disepakati dan bersifat umum. Tetapi ada juga singkatan dan akronim yang tidak dipahami masyarakat sebab setiap bidang memiliki singkatan dan akronim tersendiri, seperti di bidang politik, bidang olahraga, bisnis, pendidikan dan yang lainnya. Akhir-akhir ini, di Jawa Barat sedang gencar pembagian alat peraga kampanye dikarenakan akan berlangsungnya pemilihan umum serentak di Jawa Barat, terdapat beberapa alat peraga kampanye yang menggunakan akronim dalam bahasa Indonesia yang berlebihan dan tidak sesuai. Semakin lama, semakin banyak akronim-akronim dan singkatan dikenalkan di dalam bahasa Indonesia, maka semakin susah orang-orang asing untuk mengerti dan orang Indonesia sendiripun banyak yang tidak mengerti istilah-istilah tersebut. (Suwastoyo August 31, 2004).

Akronim yang digunakan dalam kampanye memang sudah menjadi ciri khas dari partai politik dalam rangka menarik perhatian dan memberikan kesan yang mudah diingat oleh para pendukung partai politik tersebut. Demi mendapatkan akronim yang menarik dan mudah diingat seringkali dalam pemilihan akronim tersebut tidak memperhatikan kaidah penulisan serta ejaan yang baik dan benar. Maka, sering kali didapati beberapa akronim dalam alat peraga kampanye yang rancu, membingungkan pembaca dan tidak dapat diterima oleh pemikiran.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimanakah kesalahan akronim yang terdapat pada alat peraga kampanye?

Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan serta menjelaskan bagaimana kesalahan akronim yang terdapat pada alat peraga kampanye.

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai akronim yang terdapat pada alat peraga kampanye yang dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan ataupun sebagai kajian ulang dalam menganalisis kesalahan berbahasa dalam bidang akronim yang terdapat pada media pamflet, spandul, ataupun koran dan media yang lainnya.

## **B. KAJIAN TEORETIK**

Nugroho Notosusanto (1979 : 3 – 4), J.S. Badudu (1983 : 87), dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam dua bukunya Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan menyebutnya singkatan. Sedangkan Harimurti Kridalaksana dalam tiga bukunya (1988 : 56), (1992 : 162), dan (1993 : 1 dan 105) menyebutnya sebagai kependekan. Dengan demikian, ada dua istilah yaitu singkatan dan kependekan.

Kependekan dan singkatan adalah hasil dari proses bahasa, dan prosesnya adalah pemendekan dan penyingkatan. Untuk menyeragamkan persepsi, penulis akan memilih istilah kependekan untuk penamaan hasil proses bahasa dan pemendekaan untuk penamaan hasil proses bahasa dan pemendekaan untuk prosesnya. Kependekaan adalah hasil pemedekan dan pemendekan adalah pemendekan bentuk sebagai pengganti bentuk yang lengkap atau proses bahasa berupa penggantian bentuk, baik kata atau frase dengan cara penanggalan satu atau beberapa bagian komponen sehingga menjadi bentuk baru.

Alasan pengambilan istilah ini, supaya tidak tumpang tindih antara kependekan sebagai “Induknya” dan singkatan sebagai bagian dari kependekan. Sebab beberapa pendapat yang menggunakan istilah singkatan ada ketumpangtindihan antara singkatan sebagai bagian terbesar dan singkatan sebagai bagian dari singkatan.

Kependekan merupakan salah satu proses bahasa. Sedangkan proses bahasa adalah alat, bahan, dan prosedur yang dipakai manusia untuk menghasilkan dan memahami bahasa (Harimurti Kridalaksana , 1993 : 180). Sebagai contoh perbedaan input dan output proses morfologis dan proses bahasa yang dimaksudkan ialah (1) proses morfologis yaitu leksem *makan* mengalami proses morfologis berubah menjadi berbagai kata seperti *makanan, memakan, dan dimakan*; (2) proses bahasa dalam pemendekan di antaranya (a) kata penelitian dan kata khusus menjadi akronim litsus; (b) kata angkatan, bersenjata, republik, dan kata Indonesia menjadi singkatan/akronim ABRI; (c) kata anggaran, pendapatan, belanja, dan kata negara menjadi singkatan APBN; dan (d) kata garis-garis, besar, haluan, dan kata negara menjadi singkatan GBHN.

Kalau kita perhatikan komponen-komponen pembentuknya seperti, penelitian, angkatan, bersenjata, republik, anggaran, pendapatan, dan garis-garis, ternyata bukan leksem tetapi kata, begitu juga dengan komponen lainnya. Kata-kata tersebut dapat dikembalikan pada bentuk leksemnya atau morfem bebas dan morfem terkaitnya sebagai berikut:

- a. Penelitian leksem teliti + afiks pe - an ;
- b. Angkatan leksem angkat + afiks - an ;
- c. Bersenjata leksem senjata + afiks ber - ;
- d. Republik leksem publik + afiks re - ;
- e. Pendapatan leksem anggar + afiks - an;
- f. Garis-garis leksem garis reduplikasi.

Perbedaan di atas, antara proses morfologis dan proses bahasa, dapat menunjukkan adanya perbedaan antara leksem dan kata. Selain itu kedua proses di atas akan memberikan hasil/output yang berbeda. Pada proses morfologis hasilnya/outputnya adalah kata atau disebut juga kata jadian. Sedangkan pada proses bahasa hasilnya/outputnya adalah bentuk bahasa atau bentuk bahasa baru. Artinya dalam pemendekan hasilnya adalah kependekan, bukan kata.

## **1. Akronim dan Permasalahannya**

### **a. Pengertian Akronim**

Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar (misal mayjen mayor jenderal, rudal peluru kendali, dan sidak inspeksi mendadak) (Depdiknas, 2005:21). Sedangkan, singkatan adalah hasil menyingkat (memendekkan), berupa huruf atau gabungan huruf (misal DPR, KKN, yth., dsb., dan hlm.); kependekan; ringkasan (Depdiknas, 2005: 1071). Bentuk pemendekan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bentuk akronim. sedangkan menurut Chaer (2012: 192) akronim adalah hasil pemendekan yang berupa kata atau dapat dilafalkan sebagai kata. Wujud pemendekan dapat berupa pengekaln huruf-huruf pertama, berupa pengekaln suku-suku kata dari gabungan leksem, atau bisa juga secara tidak beraturan.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu dijelaskan. Pertama, unsur pembentuknya yang terdiri dari huruf, suku kata, dan bagian lainnya atau bunyi, suku kata, dan kombinasi keduanya. Versi pertama (huruf, suku kata, dan bagian lainnya) dikemukakan oleh Harimurti Kridalaksana dan versi kedua adalah versi penulis (bunyi, suku kata dan kombinasi keduanya).

Kedua adalah hasilnya yang ditulis dan diucapkan seolah-olah berstatus kata. Maksud pernyataan ini adalah hasil pengakroniman itu benar-bener bukan kata tapi bentuk bahasa baru dalam hal ini akronim. Tetapi dalam penulisannya dan pengucapannya seolah-olah kata, artinya tidak dituliskan terpisah atau memakai jarak atau tanda pisah ( - ). Hanya memang terdapat penyimpangan dari kaidah Ejaan Bahasa Indonesia Yang

Disempurnakan seperti cara penulisan menggunakan huruf kapital seperti ABRI, IKIP, AMPI, dan LAN. Penulisan abri, Abri, A-B-R-I adalah penulisan yang salah. Penulisan SESKOAD, Ses-ko-ad, se s ko ad adalah penulisan yang salah, yang benar adalah seskoad.

Ketiga adalah istilah proses bahasa. Proses bahasa yang telah diungkapkan adalah tinjauan dari input dan output. Inputnya bukan leksem tapi kata dan outputnya bukan kata tapi akronim.

#### **b. Bunyi dan Suku Kata sebagai Pembentuk Akronim**

Seperti yang telah diungkapkan di atas ada dua versi pendapat tentang unsur pembentuk akronim. Versi pertama dapat dilihat pada buku Pembentukan Kata Bahasa Indonesia (Harimurti Kridalaksana, 1992 : 162). Sedangkan versi kedua akan sedikit dijelaskan di bawah ini.

Bunyi atau bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap/artikulasi manusia (Harimurti Kridalaksana, 1992 : 33). Mengapa bunyi sebagai pembentuk akronim? Pertanyaan ini perlu mendapat penjelasan yang dikaitkan dengan komponen pembentuk akronim dalam proses pengakroniman. Pemilihan ini tidak semata-mata pemilihan huruf tapi pemilihan bunyi yang berhubungan dengan sedap bunyi/euphony. Seperti akronim peltu (pembantu letnan satu), pemilihan bunyi /1/ dan suku kata tu cenderung hanya memperhatikan segi euphony. Sebab kalau petu atau pelsa atau pelesa rasanya tidak sedap di telinga. Atau akronim depdagri (Departemen dalam negeri) pemilihan komponen dep untuk kata departemen dan komponen gri untuk kata negeri cenderung karena euphony. Sebab kalau berdasarkan keberaturan Depdagri harusnya depdaneg, depdane atau dedane, tapi ketiga bentuk ini tidak sedap didengar.

Suku kata adalah struktur yang terdiri dari satu atau lebih urutan fonem yang merupakan bagian penting dari kata (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1994 : 970). Suku kata merupakan komponen yang paling produktif dalam pembentukan akronim. Tetapi banyak yang bergabung dalam bunyi lain atau kombinasi antara bunyi dengan suku kata.

Kombinasi keduanya maksudnya adalah kombinasi atau gabungan antara bunyi dengan suku kata. Kombinasi ini bisa berdekatan atau tiak. Contoh depdikbud (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ) terdiri dari dep merupakan kombinasi suku kata de dengan bunyi [p] dik merupakan kombinasi suku kata di dengan bunyi [k]. Akronim Depdikbud adalah kombinasi yang berdekatan. Tapi ada pula kombinasi yang tidak berdekatan/berurutan seperti akronim jubir (juru bicara). Komponen bir dari kata bicara diambil dari suku kata pertama dan bunyi pertama suku akhir. Kombinasi juga bisa terjadi antara bunyi dengan bunyi. Contoh ini tampak pada akronim seperti Kapolwil (Kepala Polisi Wilayah) dan Kades (Kepala Desa). Komponen ka diambil dari kata kepala yang seharusnya ke. Dalam hal ini terjadi kombinasi bunyi awal dan akhir.

## **2. Pola / Sistem Pengakroniman**

Akronim yang diciptakan untuk “mempersingkat”, memang banyak yang menuding tidak memiliki pola yang teratur dalam pembentukannya. Meskipun demikian beberapa ahli bahasa mengemukakan beberapa pendapat berkenaan dengan pola pengakroniman. Sebut saja Harimurti Kridalaskana, Lukman Ali, Nugroho Notosusanto, J.S. Badudu, dan ahli lainnya. Tetapi pendapat mereka juga tidak akan dibahas di sini. Yang akan dibahas adalah bagaimana proses sebuah kelompok kata menjadi akronim dan hubungannya dengan referensi kata dan kaajegan, yang tentu saja tidak akan lepas dari euphony.

Akronim yang muncul bermula dari terasa panjangnya sebuah kelompok kata yang sebenarnya hanya memiliki satu referen. Sehingga pemakai bahasa berusaha untuk membuat satu bentuk bahasa untuk satu referen.

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam analisis ini mencakup empat hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Sasaran dan anjakan penelitian.
- b. Data dan sumber data.
- c. Metode pengumpulan data.
- d. Metode analisis data.
- e. Metode penyajian hasil analisis data.

Sasaran dan anjakan penelitian dalam penelitian ini yang dikaji adalah akronim yang terdapat pada berbagai alat peraga kampanye berupa poster, pamflet ataupun foto di media sosial.

Ada dua tahapan yang dipakai pengumpulan data pada penelitian ini. Tahap pertama adalah pengambilan data dari sumberdata dengan cara disimak dan dicatat. Tahap kedua penganalisisan data dan upaya perbandingannya.

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data yaitu dengan teknik simak dan catat, maksudnya adalah setiap data yang didapat disimak baik – baik kemudian dicatat beberapa kesalahan yang terdapat pada data yang diperoleh.

#### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Kesalahan Penggunaan Akronim Pada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Nomor Urut 3



Ditinjau dari singkatan kedua nama pasangan calon gubernur tersebut kurang tepat, dikarenakan penggunaan akronim “Asyik” jika diamati akan terlihat ketidak pantasan atau kurang berterima. Akronim yang digunakan biasanya merupakan singkatan dari nama calon gubernur dan wakil gubernur. Pada keterangan nama pasangan tersebut adalah Sudrajat dan Syaikhu kemudian digabungkan menjadi akronim “Asyik” yang tentunya terdengar atau terlihat kurang tepat bila disebut atau dibaca kemudian dijelaskan arti dari kepanjangan “Asyik” tersebut.

##### 2. Kesalahan Penggunaan Akronim dan Pada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 4



Terdapat kesalahan akronim yaitu penggunaan angka ditengah-tengah akronim yang menjadikannya sulit untuk dipahami. Angka 4 tersebut dapat bermakna nomor urut empat atau “Four” dan diberi makna lain yaitu “for” dalam bahasa Inggris yang memiliki makna “untuk”. Penggunaan angka ditengah-tengan akronim tersebut tentunya sangat tidak efektif terutama bagi pembaca awam. Akronim tersebut tentunya tidak sesuai dengan penggunaan akronim yang baik dan benar.

3. Kesalahan Penggunaan Akronim dan Pada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 2



Kesalahan terdapat pada akronim "Hasanah" jika memang akronim tersebut merupakan singkatan dari kedua pasangan tersebut maka akan terasa kurang berterima dikarenakan nama dari calon wakil tersebut adalah Anton Charliyan sedangkan akhir dari akronim tersebut "nah". jika diamari memang kurang tepat karena akan menimbulkan kebingungan atau makna lain dari pembaca.



Kemudian pada gambar ke dua, terdapat kejanggalan yaitu munculnya kata "Amanah" setelah nama Anton. Tentunya hal tersebut menjadikan pembaca kebingungan memaknai akronim "Hasanah" tersebut. Namun, apabila pembaja jeli dan menganalisis maka akan diperoleh pemahaman



bahwa kata “Amanah” tersebut bukan merupakan nama lengkap dari calon wakil gubernur, kata “Amanah” merupakan sebuah jargon khusus dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua.

#### 4. Akronim yang Terlalu Dipaksakan



Akronim yang terlalu dipaksakan akan menyebabkan akronim tersebut kurang tepat karena terdapat kata-kata yang merupakan kepanjangannya tetapi dalam akronim tersebut tidak ada ada. Seperti dalam gambar tersebut terdapat kata “Bersama” namun dalam akronimnya tidak memunculkan huruf yang mewakili dari kata “Bersama” tersebut.

#### E. SIMPULAN

Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Sedangkan akronim, ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata.

Akronim atau singkatan yang terdiri dari dua atau tiga huruf disarankan sebaiknya tidak dijadikan judul artikel, kecuali untuk kasus-kasus istimewa, karena akronim dan singkatan yang terdiri dari dua atau tiga huruf dapat memiliki kepanjangan lebih dari satu dalam bahasa-bahasa yang berbeda.

Akronim dapat digunakan dalam semua segi kehidupan begitu pun dengan dunia politik. Dunia politik menggunakan akronim sebagai sarana untuk memperkenalkan calon ketua dan wakil ketua baik itu pemilihan Presiden, Gubernur maupun Bupati. Dalam pembentukan serta pemilihan akronim dalam partai politik ternyata dijumpai beberapa kesalahan seperti penggunaan angka pada akronim yang tidak seharusnya digunakan, serta akronim yang tidak berterima oleh pemikiran kita. Maka untuk pembentukan akronim, hendaknya memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Pada

artikel yang dibahas penggunaan dari singkatan dan akronim telah sesuai dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan atau EYD.

Agar dapat memahami lebih jauh mengenai akronim maka hendaknya diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akronim dan seluk beluknya dari berbagai sumber.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alisyahbana, Sutan Takdir. 1978. *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia II*. Dian Rakyat: Jakarta.

Badudu, J.S. 1983. *Membina Bahasa Indonesia Baku*. Pustaka Prima Bandung.

Chaer, Abdul. 2003. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chaer, Abdul. 2012. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Pendidikan Nasional. 1992. *Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Kridalaksana, Harimurti. 1988. *Beberapa Prinsip Perubahan Leksem Bahasa Indonesia*. Kanisius: Yogyakarta.

Kridalaksana, Harimurti. 1992. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Notosusanto, Nugroho. 1979. *Masalah Akronim dan Singkatan dalam Perkembangan Bahasa Indonesia (dalam majalah Bahasa dan sastra)*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta.

<http://nusantaralink.blogspot.com/2011/01/lingustika-tanyajawab-kebahasaan.html>

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>